



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 210, 2017

KEMENHUB. Tenaga Pemeriksa Sarana
Perkeretaapian. Sertifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 8 TAHUN 2017
TENTANG

SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA
PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga pemeriksa sarana gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
5. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga pemeriksa sarana yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.

9. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian.
- (2) Pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian.
- (3) Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan sarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian;
 - c. mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian;
 - d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;

- e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- g. mampu menilai hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Tenaga pemeriksa sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk *smart card* yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian.
- (4) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 4

Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik;
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik; dan

- c. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana; dan
 - b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan.
- (2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
 - b. menyusun laporan hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian.
- (3) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. merencanakan pelaksanaan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
 - b. melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
 - c. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian;
 - d. menetapkan hasil pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
 - e. memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian.

BAB III
PERSYARATAN SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA
SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan di Bidang Perkeretaapian setingkat Diploma III;
 - 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana; dan
 - 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana;

- 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
- 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 7

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana yaitu :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
 - 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana; dan
 - 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :

- 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana;
- 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
- 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 8

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana, harus memenuhi persyaratan :
 - 1) pria atau wanita;
 - 2) sehat jasmani dan rohani;
 - 3) tidak buta warna;
 - 4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
 - 5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan
 - 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan, harus memenuhi persyaratan :

- 1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana;
- 2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
- 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh :
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
 - b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
 - c. penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - d. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian terdiri atas :
 - a. teori;
 - b. praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.
- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, peserta yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

Pasal 11

- (1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat centi meter);
 - d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
 - e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 12

Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan
- d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
- e. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

Pasal 13

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V
PERSYARATAN DAN KOMPETENSI ASSESOR BIDANG
PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 15

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.

Pasal 16

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan :

- a. Pendidikan minimal D III atau sederajat;
- b. Memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun dibidang Perkeretaapian; dan
- c. Memiliki sertifikat Assesor di Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.

Pasal 17

Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 18

- (1) Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN
TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 19

- (1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
 - a. membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
 - b. melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian harus :
 - a. Paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus melakukan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan / atau
 - b. mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 20

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib:

- a. menetapkan prosedur pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. menyediakan peralatan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian;
- d. memerintahkan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian untuk melaksanakan pemeriksaan sarana perkeretaapian minimal 2 (dua) tahun sekali; dan
- e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Sertifikat Keahlian dan Tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Pencabutan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 22

Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
- c. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan.

Pasal 23

Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berkaitan dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; dan
- e. melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Pasal 24

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA
PENGENAL TENAGA PEMERIKSA SARANA
PERKERETAAPIAN

Pasal 25

- (1) Sertifikat Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal.
- (2) Buku Sertifikat Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:
 - a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;

- b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
 - c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
 - d. halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
 - e. nomor buku;
 - f. bidang keahlian;
 - g. tingkat/level;
 - h. peraturan Menteri Perhubungan terkait;
 - i. nomor dan kodifikasi sertifikat;
 - j. nama pemegang;
 - k. tempat dan tanggal lahir;
 - l. jenis kelamin;
 - m. kebangsaan;
 - n. alamat tempat tinggal;
 - o. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - p. tanda tangan pemegang sertifikat;
 - q. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - r. bidang keahlian;
 - s. tanggal pengeluaran sertifikat;
 - t. masa berlaku;
 - u. tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - v. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
 - w. perhatian;
 - x. catatan; dan
 - y. jenis sarana yang dilakukan pemeriksaan.
- (3) Tanda pengenal keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm;
 - b. warna dasar biru muda;
 - c. bagian depan berisi :
 - 1) logo perhubungan;
 - 2) tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

- 3) tulisan kualifikasi “PMS”;
 - 4) tulisan tanda pengenal keahlian;
 - 5) nama;
 - 6) tempat / tanggal lahir;
 - 7) kategori keahlian;
 - 8) tingkat;
 - 9) unit kerja;
 - 10) tanggal berlaku;
 - 11) kodifikasi sertifikat;
 - 12) pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - 13) tanda tangan pejabat berwenang; dan
 - 14) *barcode*.
- d. bagian belakang berisi :
- 1) dasar hukum;
 - 2) kewajiban apabila terjadi kehilangan/kerusakan; dan
 - 3) alamat Ditjen Perkeretaapian.

Pasal 26

Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dapat dilakukan oleh :
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
 - b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

- (2) Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 28

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian.

Pasal 31

Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 8 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA SARANA PERKERETAAPIAN

I. Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

1. Tampak Depan Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana



2. Tampak Depan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan

<p>REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p> <hr style="border: 2px solid red;"/>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MINISTRY OF TRANSPORTATION</p>	<p>1</p> <p>REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN DIRECTORATE GENERAL OF RAILWAYS</p>  <p>BIDANG KEAHLIAN..... AREA OF EXPERTISE</p> <p>Sertifikat ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor _____</p> <p>This Certificate is issued in compliance with the Transportation Ministerial Regulation.....</p>
--	--

3. Isi Buku Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;"><u>REPUBLIK INDONESIA</u> REPUBLIC OF INDONESIA</p> <p>I. <u>Nomor</u> : Number</p> <p>II. <u>Nama Pemegang</u> : Name of Holder</p> <p>III. <u>Tempat dan Tanggal Lahir</u> : Place and date of birth</p> <p>IV. <u>Jenis Kelamin</u> : VI.1.1.1.1.1.1 Sex</p> <p>V. <u>Kebangsaan</u> : Nationality</p> <p>VI. <u>Alamat Tempat Tinggal</u> : Address</p> <p>VII. <u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p>VIII. <u>Tanda tangan pemegang</u> : Signature of Holder</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 40px; margin: 5px auto; text-align: center; padding: 2px;"> Foto 2x3 </div>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>IX. <u>Bidang Keahlian</u> Area of Expertise</p> <p>Sertifikat ini menyatakan bahwa personil yang nama dan datanya tercantum dalam halaman 2 (dua), memiliki kompetensi yang telah disahkan untuk melaksanakan</p> <p>certificate is to declare the person whose name and data are stipulated on page 2 (two), has the competence</p> <p>X. <u>Tanggal Pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p>XI. <u>Berlaku hingga</u> : Valid until</p> <p>VI.1.1.1.1.1.2 XII. <u>An. Direktur Jenderal</u> <u>Perkeretaapian.</u> For The Director General of Railways</p> <p>Director of</p> <p>.....</p>
---	---

4	5
<p>XIII. <u>Perpanjangan</u> Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> : Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> : Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> : Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA</u> : Signature and Stamp by DGR</p>	<p>XIV. <u>Catatan</u> Records</p> <p>XV. Jenis sarana yang dilakukan pemeriksaan</p>

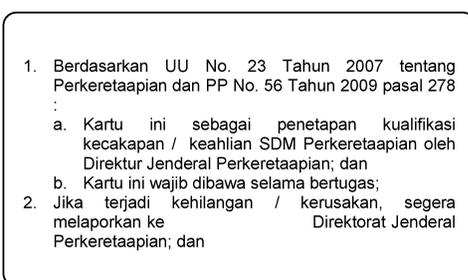
6	7
<p>XI. <u>Perhatian</u> Attention</p> <p>a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.</p> <hr/> <p>Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.</p> <p>b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</p> <hr/> <p>If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.</p> <p>c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.</p> <hr/> <p>If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways</p>	

II. TANDA PENGENAL

1. Tampak depan Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian



2. Tampak belakang Tanda Pengenal Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian



Keterangan :

Tampak Depan :

1. Ukuran 8,8 X5,5 cm
2. Warna Dasar Tampak Depan Putih
3. Warna garis di bawah logo Kementerian Perhubungan tampak depan coklat, dengan ketentuan :
 - a. Tanpa garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana
 - b. Satu garis untuk Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian tingkat Pelaksana Lanjutan
4. Warna Dasar Tampak Belakang Putih

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI